

# PERANAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA

Oleh : Florentinus Sudiran

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

## ABSTRACT

*The aim of this research is to know the regulation of the Minister of Education and culture Number 23 , 2017 on the strengthen of the character of education by one day school in 5 days per week. The location of it is in Indonesia in September 2017 by using method of library one by taking the correlated news in the only resource namely Gatra magazines published n August 30,17 by reasoning is that the discription of it very interesting by the title THE WAYOUT TO STRENGTHEN THE CHARACTER and there are only some people have read this title . The results of it are (1). The one day school make polimic in the education society ,(2). The pro-ones said that the one dy school (a). It can give oPeraturan Pemerintahortunity to strengthen the students's character ,(b). It can give one day to gether with their parents on Saturday ,(c). The parents can catch-up the children at 5 o'clock PM from their offices and together home ,(3). The contra by giving any argument,(a). It makes the students tired and boring with ,(b). The program for 6 days school can cover the strengthenness of the students' charchter,(c). Some schools have arranged the activity of deepening their religion in such that the program can go well. The suggestions are ,(1). The schools can choose the the best for them ,(2). This regulation may not become polemic because can make chaos,(3). The parents can be given the problem solving ,(4). The government has to make president'decision to prevent the chaos.(5).*

---

Keywords : **character of education, one day school, polemic, chaos**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*curriculum is the heart of education*). Oleh karena itu, sudah seharusnya kurikulum, saat ini, memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan kurikulum masa sebelumnya.

Upaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir, menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah menjawab kegelisahan bangsa dengan maraknya tindak pidana korupsi, kejahatan dan sikap atoleransi serta perpecahan diantara unsur bangsa. Upaya ini perlu diapresiasi bagi yang sudah mapan sekolah 6 hari yaitu Senin sampai Sabtu masing-masing hari rata-rata 6 jam silahkan diteruskan namun bagi yang melaksanakan one day school juga diteruskan saja sedang yang lain silahkan memilih mana yang paling cocok dengan kondisinya. Memang generasi muda harus disiapkan untuk menyongsong generasi emas yang cerdas. Hal ini disadari oleh semua pihak dengan usulan, komentar dan seminar. Sebentar lagi kita akan memperoleh bonus demografi yaitu bonusnya bahwa 60 % penduduk adalah usia muda yang energik, tangkas dan cepat. Hal ini digayung bersambut dengan langkah pemerintah yang (1) Terbuka untuk investasi dengan memangkas aturan yang menghambat; (2) Membangun infrastruktur mulai dari perbatasan agar akses jalan dapat dibuka; (3) Pemerintah memberkat berbagai fasilitas seperti BPJS, kartu sehat, kartu pintar, beasiswa, bidik misi dan lain-lain. Bagi para akademisi saat ini adalah waktu yang tepat dimana pemerintah memberikan hibah-hibah penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang nilainya milyaran rupiah. Para dosen dan guru diberi tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok sehingga kesejahteraannya meningkat dengan harapan kinerjanya bagus. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak program sekolah baik one school dan 6 hari sekolah, yang penting para stakeholder sekolah ikut mendidik generasi muda yang mampu bersaing.

## **B. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah membuat kebijakan publik dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Manfaat penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah memperkuat pendidikan karakter di Indonesia agar sebagai generasi muda dapat meneruskan pembangunan demi kesejahteraan bangsa.

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Pengertian, Tujuan dan Proses Kebijakan Publik**

Menurut Anderson, Pengertian Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson mengatakan bahwa terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
2. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
4. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
5. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Tujuan kebijakan Publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.

Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.

### **C. Proses Kebijakan Publik**

Menurut Younis, Proses Kebijakan Publik dibagi menjadi 3 tahap yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Gortner menjelaskan ada 5 proses kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi.

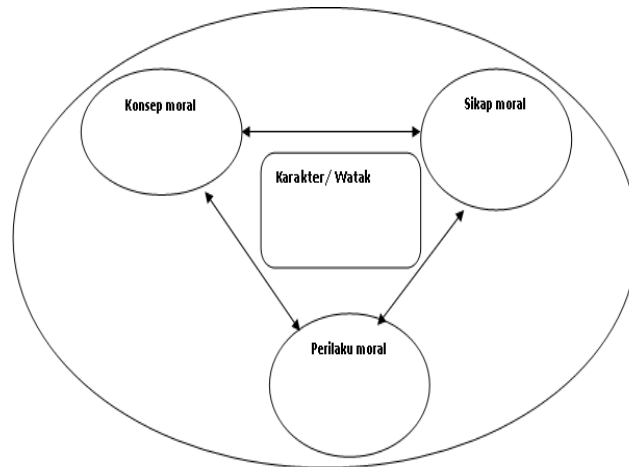
Menurut Starling, terdapat 5 proses kebijakan publik yaitu :

1. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain : menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab-akibat dan teknik-teknik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabatan keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya.
5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak. (Hanif Nurcholis, 2005)

### **D. Pendidikan Karakter**

Penguatan pendidikan moral (*moral education*) atau pendidikan karakter (*character education*) dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu betapa *pentingnya pendidikan karakter*.

Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral felling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan dibawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir ini.



Gambar 1: Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan Karakter yang baik menurut Lickona

Pengertian Pendidikan Karakter menurut Ahli :

1. Menurut Lickona

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

2. Menurut Suyanto

Suyanto (2009) mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.

2. Menurut Kertajaya

Menurut Kertajaya karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu.

### III. PEMBAHASAN

Menurut majalah mingguan Gatra terbit tanggal 30 Agustus 2017 ada beberapa contoh sekolah yang telah melaksanakan *one day school* dan ada yang belum/bisa. Berikut argumen mereka :

SD Menteng 1 yang telah melaksanakan *one day school*, sekolah ini adalah sekolahnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama (Gatra, 2017:26). Waktu itu puluhan murid kelas 3 dan 4 SD Negeri Menteng, Jakarta Pusat terlihat asyik membaca buku di halaman sekolah. Di bawah naungan kanopi, dengan guru masing – masing mereka belajar bersama dengan nyaman. Pemandangan seperti itu telah terbiasa bagi sekolahnya Obama waktu kecil. Menurut kepala sekolahnya Edy Kusyanto bahwa pemandangan ini sebagai bagian kegiatan ekstrakurikuler setelah kegiatan intrasekolah. Dalam sepekan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini sampai sore hari atau *one day* dengan 5 hari sekolah dan hari Sabtu dan Minggu libur agar mereka bisa

istirahat 2 hari di rumah bersama orangtuanya. Hal seperti ini telah tahun dilaksanakan dan berjalan lancar. Hal ini bisa terlaksana atas kesepakatan antara orang-tua dan sekolah. Pola ini sesuai dengan Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Sistem ini juga memberi kemudahan bagi orangtuanya untuk menjemput anaknya setelah pulang kerja. Menurut Edy bahwa para siswa berasal dari luar kota namun orang mereka bekerja dekat sekolahnya. Konsep ini memudahkan penjemputan anak usai kerja. Sejauh ini tidak keluhan dari orangtua. Oleh karena itu SD Menteng 1 mendukung kemendikbud.

Ada pula yang menolak, yaitu Madrasah Daniyah (Madin) Arabani Cikeas, Bogor, Jawa barat yang tidak melaksanakan *one day school*. Ali Abdillah sebagai pengelola terusik oleh adanya kebijakan *full day school* (FDS). Kebijakan ini memberatkan santrinya, malah enam dari 50 murid peserta ajar sudah jarang datang.

Ada pula Madin Radhatul Muttaqiem Sleman di Yogyakarta, Kepala Madin Radhatul Muttaqiem menyoal pasal 2 ayat (1) Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tersebut bahwa pasal itu menyebut hari sekolah dilaksanakan 8 jam sehari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Lantas yang menerangkan hari sekolah digunakan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hal ini menjadi masalah karena waktu kegiatan belajar mengajar ditambah dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 sore sehingga sistem ini akan berpotensi kuat mematikan madrasah diniyah, pesantren TPA dan TPQ. Penerapan peraturan pemerintah kalau dipaksakan akan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Salah satunya pendidikan diniyah. Lantas pelaksanaan pendidikan agama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan keagamaan. Ia bersikukuh bahwa bila peraturan pemerintah ini menjadi keharusan maka otomatis mengganggu kegiatan diniyah yang merupakan pendidikan nonformal keagamaan berbasis masyarakat serta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : (1) Sekolah sehari penuh menjadi polemik di masyarakat; (2) Yang setuju menilai bahwa PPK ini dapat untuk memperkuat pendidikan karakter siswa, dapat berkumpul bersama keluarga pada hari Sabtu dan Minggu, orangtua dapat menjemput putra-putrinya setelah pulang kerja; (3) Yang tidak setuju mempunyai argumen, membuat siswa lelah dan bosan, program sekolah 6 hari dapat mendukung penguatan karakter juga, beberapa sekolah telah memprogramkan kegiatan tersendiri untuk memperkuat pendidikan karakter dengan memperdalam ilmu agama.

##### B. Saran-saran

Saran-saran pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pemerintah memberi kebebasan sekolah untuk memilih salah satunya; (2) PPK ini tidak boleh menjadi polemik kepanjangan yang berpotensi ricuh di masyarakat (*chaos*); (3) Orangtua diberi pemahaman dan penyelesaian masalah (4). Presiden harus membuat Perpu untuk meredam *chaos* di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2010. "Agama, Budaya, dan Pendidikan Karakter Bangsa" *Makalah* dalam [www.icmijabar.com](http://www.icmijabar.com).
- Azwar, Syaifudin. 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo : Jakarta.
- Hidayat, Komaruddin. 2006. *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Karli, Hilda. 2005. *Pendidikan karakter*. Jakarta: Gresindo. Koesoema, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Gresindo.
- Pasolong, Harbani. (2010) *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Widodo, Joko. (2008) *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Bayumedia.
- Winarno, Budi. (2007) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo